

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Bandung merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia sebagai ibukota Jawa Barat. Selain Kota Bandung pada Provinsi Jawa Barat terdapat sembilan kota yang terdiri dari Kota Bekasi, Bogor, Cirebon, Depok, Sukabumi, Tasikmalaya, Cimahi, dan Banjar. Pada laporan realisasi APBD pada tahun 2017 Kota Bandung mempunyai tingkat kemandirian yang paling tinggi, perbandingan tingkat kemandirian kota yang terdapat di Jawa Barat sebagai berikut.

Tabel 1.1 Tingkat Kemandirian Kota di Jawa Barat

No	Nama Kota	PAD	Total Pendapatan	Tingkat Kemandirian
1	Bandung	2.152.755.704.962	5.685.213.859.929	43,2 %
2	Bekasi	1.611.380.424.704	4.171.774.820.532	38,62%
3	Bogor	681.623.879.680	2.130.926.895.104	31,9%
4	Cirebon	319.564.611.584	1.398.197.321.728	22,8%
5	Depok	795.350.532.096	2.263.644.110.846	35,13%
6	Sukabumi	339.578.781.691	1.212.921.806.848	27,9%
7	Tasikmalaya	248.140.546.048	1.501.525.966.848	16,5%
8	Cimahi	226.983.542.784	1.219.531.374.592	18,6%
9	Banjar	119.729.209.344	725.587.197.952	16,5%

Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> (data diolah penulis tahun 2018)

Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) disebut sebagai entitas akuntansi (*accounting entity*). Sebagai entitas akuntansi (*accounting entity*) Satuan Kinerja Perangkat Daerah harus melaksanakan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan (yang mencakup anggaran dan barang, diiringi dengan dana yang dikelola oleh bendahara fungsional).

Pemilihan SKPD Kota Bandung sebagai objek pada penelitian ini adalah SKPD Kota Bandung merupakan bagian dari pemerintah daerah yang mempunyai fungsi melakukan pelayanan publik seriat bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah. SKPD diberikan wewenang untuk mengatur alokasi dana (anggaran) dan barang/aset yang dibutuhkan. Selain itu, Kota Bandung memiliki

persentase tingkat realisasi anggaran yang tinggi pada tahun 2012-2016. Tingkat pencapaian realisasi pendapatan selalu berada diatas 90% sedangkan belanja anggaran selalu dibawah 70%.

1.2 Latar Belakang

Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang diterapkan pada dana publik di lembaga lembaga tinggi negara dan departemen–departemen dibawahnya. Dalam akuntansi sektor publik juga mencakup bagaimana informasi akuntansi yang relevan dan handal yang ditujukan pada pimpinan dengan maksud perencanaan (perancangan strategik, pemberian informasi biaya, penilaian investasi dan penganggaran, penentuan biaya pelayanan, penilaian kinerja). Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia saat ini dilihat dengan adanya pelaksanaan otonomi dan desentralisasi daerah. (Bastian, 2013)

Setiap daerah dianggap perlu untuk mengelola kebutuhan masing-masing. Mulai dari aturan-aturan hingga sistem pemerintahan, Negara memberikan kewenangan pada daerah. Negara Indonesia menerapkan sistem desentralisasi dimana setiap daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan kemandirian daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Daerah berhak untuk mengembangkan daerahnya sendiri baik dengan pembangunan infrastuktur, pendidikan, tata ruang, pengelolaan keuangan serta regulasi daerahnya selama masih berakar pada dasar Negara yaitu Undang-undang Republik Indonesia dan Pancasila. Sesuai dengan UU RI No 23 pasal 1 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan, “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia.”, dengan demikian pengelolaan sumber daya daerah tentu mengakibatkan daerah mempunyai pendapatannya dan pengeluarannya sendiri.

Pemerintah harus berupaya untuk menampung aspirasi masyarakat dan mengembangkan masyarakat agar ikut andil dalam proses pertanggung jawaban eksplorasi sumber daya sekaligus pengembangan sumber-sumber pembiayaan. Pembangunan daerah sebagai bagian internal dari pembangunan nasional, didasarkan pada prinsip otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya. Prinsip otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas dan tanggung jawab yang nyata kepada pemerintah daerah. Dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, baik berupa uang maupun sumber daya alam, pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan mengembangkan suatu sistem perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang adil. Sistem ini dilaksanakan untuk menciptakan adanya keseimbangan dan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam mengatur kebutuhan daerah, pemerintah memerlukan perencanaan dan pengendalian yang baik dalam pelaksanaannya termasuk dalam menyusun anggaran.

Anggaran publik dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau pengeluaran yang terjadi di masa lalu. *Governmental Accounting Standards Board (GASB)* mendefinisikan anggaran sebagai rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu.

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimulai dengan pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya, yang sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD. Selanjutnya, DPRD akan membahas kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, akan membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap tahun kerja. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Dalam pelaksanaannya, APBD sering sekali mengalami permasalahan. APBD harus mampu diandalkan dalam mengambil keputusan yang selaras dengan tujuan pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Sistem atau tatanan yang tepat dan hasil yang sesuai dengan keadaan serta komunikasi yang baik sangat diperlukan dalam penyusunan suatu anggaran daerah. Jika dalam sistem penganggaran dalam APBD tidak tepat, maka dapat menimbulkan adanya kesenjangan anggaran. Menurut (Anthony dan Govindradjan, 2005 dalam Lestari dan Supadmi 2017:3) kesenjangan anggaran dapat diartikan sebagai perbedaan antara jumlah anggaran dan estimasi terbaik dari organisasi. Dalam penerapannya kesenjangan anggaran dilakukan agar tingkat pencapaian atau kinerja dari sebuah organisasi dianggap baik agar para penyusun beserta setiap orang yang mempunyai kepentingan mendapatkan insentif. Timbulnya suatu kesenjangan anggaran dalam sebuah organisasi atau instansi didukung dengan adanya beberapa faktor. Menurut (Widyaningtyas, 2017) dan tiga alasan pokok eksekutif melakukan kesenjangan anggaran atau (*budgetary slack*) yaitu

- a. Kesenjangan anggaran atau (*budgetary slack*) akan membuat kinerja seolah terlihat baik di mata atasan jika mereka dapat mencapai target anggaran.
- b. Kesenjangan anggaran atau (*budgetary slack*) sering digunakan untuk mengatasi ketidakpastian memprediksi masa yang akan datang.
- c. Pengalokasian sumberdaya akan dilakukan berdasarkan proyeksi anggaran biaya, sehingga senjangan membuat fleksibel.

Kesenjangan anggaran dapat diukur dengan empat komponen yaitu standar anggaran, tuntutan anggaran, tingkat kesulitan dalam pencapaian anggaran, dan target anggaran (Basyir, 2016). Pada tahun 2012 sampai tahun 2016 dilihat dari perbandingan antara anggaran pendapatan daerah dan realisasi anggaran pendapatan daerah serta perbandingan anggaran belanja daerah dan realisasi belanja daerah pada Pemerintahan Kota Bandung dihasilkan sebagai berikut.

Tabel 1.2 Perbandingan Anggaran dan Belanja dengan Realisasi Kota Bandung

Tahun	Anggaran Pendapatan Daerah	Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah	%	Anggaran Belanja Daerah	Realisasi Belanja Daerah	%
2012	2.699.863.305.476	2.699.959.304.040	100	512.562.400.732	489.590.967.845	95,8
2013	3.106.347.113.010	2.943.363.545.965	94,75	428.782.513.142	342.986.410.586	79,9
2014	5.302.471.398.707	4.953.940.629.444	93,43	5.717.545.328.505	4.435.589.826.032	77,58
2015	5.455.361.616.094	5.098.071.916.848	93,5	6.553.368.797.049	5.201.938.207.165	79,4
2016	6.508.642.846.502	6.508.642.846.502	100	6.898.076.131.265	6.855.932.292.456	99,4

Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> (data diolah penulis tahun 2018)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, terlihat bahwa realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Bandung mengalami perbedaan setiap tahunnya, dengan kurun waktu lima tahun, dimulai dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Pada realisasi anggaran pendapatan daerah Pemerintah Kota Bandung menorehkan tingkat pendapatan yang terus-menerus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Realisasi anggaran pendapatan daerah terendah dalam kurun waktu lima tahun antara tahun 2012 sampai tahun 2016 ditunjukkan pada angka Rp. 2.699.959.304 pada tahun 2012 dan terus mengalami kenaikan hingga mencapai nilai tertinggi pada kurun lima tahun tersebut pada tahun 2016 senilai Rp. 6.508.642.502. Sedangkan dalam realisasi anggaran belanja daerah mengalami naik-turun pada tahun 2012 sampai 2016.

Dalam tabel 1.2 juga memperlihatkan bahwa lima tahun berturut-turut Pemerintah Kota Bandung berhasil mendapatkan tingkat realisasi pendaptatan daerah di atas sembilan puluh persen. Bahkan pada tahun 2016 dan 2012 realisasi pendapatan daerah berhasil mencapai 100 %. Pada anggaran belanja daerah dan realisasinya, realisasi belanja daerah selalu lebih rendah daripada anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan.

Meskipun persentase realisasi anggaran pada Kota Bandung sudah baik bahkan mencapai hingga 100%, namun dalam praktik penyusunan anggaran dan

realisasi anggaran itu sendiri tidak mendapatkan predikat yang baik. Menurut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2017 dari lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kota Bandung tahun anggaran 2014 - 2016. Dari segi pembelanjaan, BPK menemukan penyaluran pertanggung jawaban belanja hibah yang tidak sesuai, kelebihan pembayaran gaji pada PNS yang telah pensiun dan penggunaan langsung atas retribusi daerah yang belum baik. Permasalahan antara penyusunan anggaran yang tidak baik dengan persentase realisasi pendapatan dan belanja Kota Bandung yang tinggi dimana Laporan Realisasi Anggaran ternyata belum menggambarkan informasi keuangan yang sebenarnya sehingga anggaran dan realisasi tidak disusun sesuai dengan estimasi terbaik yang seharusnya. Menurut (Anthony dan Govindradjan,2005 dalam Lestari dan Supadmi 2017:3) kesenjangan anggaran dapat diartikan terdapat perbedaan perbedaan antara jumlah anggaran dan estimasi terbaik dari organisasi sehingga dapat diindikasikan terdapat kesenjangan anggaran pada SKPD Kota Bandung.

Peneliti menggunakan dua faktor sebagai variabel yang mempengaruhi kesenjangan anggaran. Faktor pertama yang pertama asimetri Informasi. Asimetri Informasi merupakan keadaan dimana prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup. Menurut teori keagenan asimetri informasi dapat timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara manajemen atau pihak yang berwenang dengan tujuan suatu organisasi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengemukakan terdapat beberapa masalah dalam penyusunan dan realisasi anggaran, salah satunya adalah barang milik daerah minimal sebesar Rp. 1.237.920.000 berupa kendaraan dinas digunakan oleh pihak yang tidak mempunyai hak. Serta permasalahan pembukuan rekening oleh bendahara SKPD tanpa melalui persetujuan kepala daerah atau BUD. Kepala Perwakilan BPK Jawa Barat mengemukakan hal ini bisa terjadi akibat kurangnya informasi pengetahuan mengenai sistem keuangan akuntansi pada Kepala SKPD sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Dalam anggaran terkandung informasi yang dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan perencanaan

yang selaras dengan tujuan suatu organisasi sehingga penyusun antara penyusun anggaran dan atasan harus memiliki kerjasama sama yang baik.

Menurut (Anthony Govindarajan 2005, dalam Lestari dan Supadmi, 2017:3) ketimpangan atau asimetri informasi ini dapat menyebabkan perbedaan pemahaman dan ketersediaan informasi dalam sebuah anggaran sehingga anggaran tidak dapat diandalkan sebagai salah satu alat dalam pengambilan keputusan kinerja agen mengenai kinerjanya. Dalam pembuatan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disingkat APBD, adanya ketimpangan informasi antara atasan dan bawahan dapat menimbulkan kurangnya pengawasan terhadap laporan realisasi anggaran daerah, keadaan ini dapat dimanfaatkan oleh pihak yang mempunyai kewenangan penyusunan anggaran daerah tersebut untuk mengatur tinggi atau rendahnya target dan realisasi pendapatan maupun belanja daerah yang dapat memicu terjadinya kesenjangan anggaran.

(Lestari dan Supadmi, 2017) juga menyatakan asimetri informasi dapat diukur dengan kecukupan informasi, kualitas informasi yaitu informasi yang mampu memenuhi kebutuhan kualitas informasi. Kuantitas informasi yaitu informasi yang mampu memenuhi kebutuhan banyaknya informasi dan yang terakhir adalah pemahaman terhadap informasi. Penelitian-penelitian terdahulu yang telah menguji pengaruh asimetri informasi terhadap kesenjangan anggaran menyatakan hasil yang berbeda atau tidak konsisten. Penelitian yang dibuat oleh (Lestari dan Supadmi, 2017) dan (Tresnayani dan Gayatri, 2016) menunjukkan asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kesenjangan anggaran. Sedangkan pada penelitian Adiantri, *et al.* (2015) dan Irfan, Muh. *et al.* (2016) menyatakan bahwa asimetri informasi mempunyai pengaruh negatif terhadap kesenjangan anggaran.

Faktor yang kedua yaitu Partisipasi Anggaran Partisipasi anggaran menurut Garrison dan Noren, 2002 dalam Ardianti, 2015:6) adalah anggaran yang dibuat dengan kerjasama dan partisipasi penuh dari manajer pada tingkatan dalam pembuatan estimasi anggaran. Partisipasi Anggaran dapat menimbulkan kesenjangan anggaran atau *budgetary slack*. Apabila setiap partisipasikan anggaran daerah mampu diatur dengan baik maka dapat mencegah terjadinya

kesenjangan anggaran., Temuan lainnya pada tahun 2017.terdapat sekitar Rp. 53 Miliar dana yang tidak masuk kedalam APBD pada PD Kebersihan. Menurut Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung subsidi telah diberikan langsung kepada PD. Kebersihan, sesuai dengan permintaan. Kemudian terdapat dana untuk penyapu jalan di kewilayahan yang meyebabkan anggaran dana tersebut berbeda dengan PIPPK, namun dana tersbeut tidak dicatat dalam APBD. Kendala ini terjadi akibat adanya koordinasi dan pengaturan yang tidak terintegrasi dengan baik pada penyusunan anggaran.

Pada penelitian (Lestari dan Supadmi, 2017) partisipasi anggaran dapat diukur dengan keikutsertaan dalam penyusunan, keterlibatan dengan pembahasan usulan dengan tim anggaran dan kontribusi dalam penyusunan anggaran. Hal ini didukung oleh penelitian (Sihombing dan Rohman, 2017) yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran dapat mempengaruhi timbulnya kesenjangan anggaran dan penelitian (Basyir, 2016) juga menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh signifikan dan positif terhadap *budgetary slack* atau kesenjangan anggaran. Sedangkan penelitian terdahulu Putu Teguh Sugiarta *et al.* (2014) menyatakan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh. Luh Gede *et al.* (2016) dan (Aji dan Amir, 2014) menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh negatif pada kesenjangan anggaran. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang tidak konsisten dan data APBD Kota Bandung yang memberikan indikasi adanya kesenjangan anggaran, sehingga penulis termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai ***“Pengaruh Asimetri Informasi dan Partisipasi Anggaran terhadap Kesenjangan Anggaran (Studi kasus pada SKPD Kota Bandung pada Tahun 2019) “***

1.3 Perumusan Masalah

Penentuan anggaran berupaya untuk mengatur pendapatan serta pengeluaran bagi pemerintah sesuai dengan tujuannya. Permasalahan dalam penyusunan maupun penetapan anggraan atau APBD dapat memicu adanya kesenjangan anggaran atau *budgetary slack*. *Budgetary slack* merupakan perbedaan jumlah anggaran yang diajukan oleh bawahan dengan jumlah estimasi terbaik organisasi.

Asimetri Informasi dapat diartikan adanya perbedaan informasi yang dimiliki oleh satu pihak dengan pihak lain. Pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau disingkat APBD, asimetri informasi dapat timbul akibat perbedaan pengetahuan atau informasi antara para penyusun APBD dengan yang dapat menimbulkan adanya suatu kesenjangan anggaran.

Partisipasi anggaran menurut adalah anggaran yang dibuat dengan kerjasama dan partisipasi penuh dari manajer pada tingkatan dalam pembuatan estimasi anggaran. Pada proses penganggaran APBD, partisipasi anggaran dapat mempengaruhi kelayakan atau kepastian suatu anggaran layak dijadikan alat pengambil keputusan. Oleh karena itu, makna partisipasi anggaran dalam sektor publik adalah keterlibatan SKPD dalam penyusunan anggaran daerah (APBD). Faktor inilah yang akhirnya membuat penulis untuk mengkaji yang mempengaruhi kesenjangan anggaran ini masih perlu untuk dikaji pengaruh apa saja yang dapat menimbulkan adanya kesenjangan anggaran pada SKPD Pemerintah Kota Bandung.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka pertanyaan penelitian yang muncul sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat asimetri informasi, partisipasi anggaran dan kesenjangan anggaran pada Pemerintah Kota Bandung?
2. Bagaimana pengaruh simultan asimetri Informasi dan partisipasi anggaran terhadap kesenjangan anggaran pada pemerintah Kota Bandung?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial :
 - a. Asimetri informasi terhadap kesenjangan anggaran pada pemerintah Kota Bandung?
 - b. Partisipasi anggaran terhadap kesenjangan anggaran pada pemerintah Kota Bandung?

1.5 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan perumusan masalah dan latar belakang tersebut, adapun tujuan dasar dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui tingkat asimetri informasi, partisipasi anggaran dan kesenjangan anggaran pada Pemerintah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui pengaruh simultan asimetri Informasi dan partisipasi anggaran terhadap kesenjangan anggaran pada pemerintah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui pengaruh parsial :
 - a. Asimetri informasi terhadap kesenjangan anggaran pada pemerintah Kota Bandung.
 - b. Partisipasi anggaran terhadap kesenjangan anggaran pada pemerintah Kota Bandung.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak berkepentingan yang dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

1.6.1 Aspek Teoritis

1. Bagi Akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana asimetri informasi, partisipasi anggaran dan kesenjangan anggaran pada sektor publik.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis lainnya sebagai media belajar ataupun referensi untuk hasil penelitian yang akan dibuat selanjutnya dalam sektor yang sama.

1.6.2 Aspek Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Bandung

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah sebagai tambahan informasi mengenai pengaruh asimetri informasi, partisipasi anggaran pada kesenjangan anggaran.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada SKPD Pemerintah Kota Bandung yang berada di Jl. Wastukencana No.2, Babakan Ciamis, Sumur Bandung 140117.

1.7.2 Waktu dan Periode Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan September 2018 sampai dengan selesai dengan menyebarkan kuisioner yang disebarakan pada SKPD Pemerintah Kota Bandung.

1.7.3 Variabel Penelitian

Dalam penulisan yang dilakukan penulis menggunakan satu variabel terikat atau dependen sebagai (Y) yaitu Kesenjangan Anggaran dan dua variabel bebas atau independen yaitu Asimetri Informasi (X1) dan Partisipasi Anggaran sebagai (X2).

1.8 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika penulisan skripsi secara garis besar disajikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang didalamnya membahas fenomena yang layak untuk diteliti serta dikaitkan dengan teori yang ada, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian secara teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan sebagai dasar penelitian tentang pengaruh asimetri informasi dan partisipasi anggaran terhadap

kesenjangan anggaran berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian dan rincian objek penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang menjawab atau menjelaskan masalah penelitian yang meliputi uraian mengenai karakteristik penelitian, alat pengumpul data, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan sumber data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas penjelasan dari hasil penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dalam mendukung penelitian kemudian dianalisis, serta dikaitkan dengan landasan teori yang relevan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilaksanakannya penelitian serta disajikan saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya